

JURNAL AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Implikasi Perjuangan Hizbut Tahrir Indonesia dalam Sistem Kenegaraan

The Implications of the Struggle of Hizb al-Tahrir Indonesia in the State System

Azman Arsyad

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Email: azman_arsyad@yahoo.com

Info Artikel	Abstract
Diterima 16 Mei 2019	<i>Ide formalisasi syariah Islam dan penegakan daulah khilafah yang ingin diterapkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia mempunyai implikasi untuk mengubah ideologi Negara Indonesia (internal) dan melawan ideologi barat yang masuk ke Indonesia. Lebih jauh, hal ini akan mempengaruhi hubungan antar negara yang berlaku saat ini. Tujuan ini akan sulit tercapai (dalam waktu dekat) oleh karena banyaknya tantangan diantaranya sistem demokrasi yang sudah lama dikembangkan di Indonesia, civil society (masyarakat madani) yang berwawasan moderat menginginkan substansi Islam, Peran lembaga MUI yang moderat sehingga dapat menangkal paham radikal dan sekuler.</i>
Revisi I 20 Mei 2019	<i>Kata Kunci: Formalisasi, Hizbut Tahrir Indonesia, Sistem Kenegaraan</i>
Revisi II 23 Mei 2019	<i>The idea of formalization of Islamic law and establishment of the Khilafah by Hizbut Tahrir Indonesia will have implications on changing the state ideology of Indonesia (internal) and resist western ideologies that came into Indonesia. Furthermore, it will affect the relationship between the state just like any today. This goal will be hard to achieve (in the near future), because of many obstacles, including; the democratic system has long been roots in Indonesia, the majority of Islamic mass organization have moderate vision and more likely to be on the substance of Islam not the formalization, not to mention, the Indonesian Ulama Council, which is still effective in counteracting the radical and secular ideas and movements.</i>
Disetujui 20 Juni 2019	<i>Keyword: Formalization, Hizbut Tahrir Indonesia, State System</i>

A. PENDAHULUAN

Nalar keagamaan kelompok Islam militan seperti Hizbut Tahrir, tampak pada pola pemahaman keagamaannya yang berorientasi pada teks-teks suci (*repolitization of the sacred*) secara scriptural yang tanpa kompromi terhadap pemikiran-pemikiran dekonstruksi Islam. Pemikiran militan Hizbut Tahrir terutama pada *din wa daulah* adalah agama memiliki peran ganda dalam mengatur kehidupan sosial, spiritual dan kenegaraan. Peran ganda tersebut menurut Hizbut Tahrir harus berbentuk negara khilafah. Konsep pemikirannya yang ideologis doktrinal Islam ini, kemudian berorientasi kepada kekuasaan Islam melalui politik, dan membawa agama sebagai ideologi negara.¹

Konsep perjuangan pengambilalihan kekuasaan Hizbut Tahrir dapat *mendekonstruksi* negara, karena khilafah akan merubah sistem negara melalui revolusi pemikiran Islam dengan cara penumbangan tata negara, sistem, dan mobilisasi massa. Khilafah juga akan mereformasi sistem kufr dan melakukan sasaran jihad kepada negara sekuler dan barat dan semua sistem ideologi yang dipandang kafir. Konsep penumbangan sistem kufr yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia tidak hanya bersifat teoritis, tetapi lebih mengarah pada tataran praktis yang berpotensi kepada penumbangan sistem kenegaraan yang sudah mapan. Cara-cara yang dilakukan adalah membangun opini publik dan mempengaruhi masyarakat untuk mendukung negara khilafah di Indonesia.

Konsep politik Islam Hizbut Tahrir Indonesia tidak melalui jalan evolusi, tetapi lebih cenderung kepada revolusi pemikiran Islam dan mobilisasi massa. Tema-tema pokok kenegaraannya banyak yang menentang pemerintah Indonesia, terutama kebijakan tentang sistem dan dasar negara Indonesia, pendidikan, ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, kecuali bagian tertentu yang dipandang berpihak kepada Islam, dengan mengapresiasi kebijakan yang berdasar syariah Islam seperti perda syariah Islam. Penumbangan negara yang sudah berdaulat dan memiliki konstitusi melalui revolusi atau dengan jalan konstitusional adalah tindakan yang tidak sah. Ideologi Islam merupakan sarana revolusi pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia untuk menegakkan cita-cita negara khilafah di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan difokuskan pada studi dokumentasi dan akan diperkaya wawancara dgn tokoh-tokoh HTI dan mengamati kegiatan-kegiatan di lapangan atau program-program HTI yang dipusatkan di wilayah jawa dan khususnya di Makassar. Data primer dan sekunder tersebut diperoleh dari bahan-bahan utama yang berkaitan dengan tema yang dibahas yaitu literatur yang digunakan sebagai dasar ideologi dan temuan pengamatan dilapangan terhadap aktivitas HTI. Penelitian ini juga memperhatikan karya-karya lain yang dianggap signifikan.

Data yang diperoleh selama proses penelitian baik itu data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

¹“Pengambilalihan Kekuasaan dalam Perspektif Pemikiran Politik Hizbut Tahrir”. Disertasi tidak dipublikasikan (Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013), h. 265.

C. PEMBAHASAN

Defensi Operasional Mengubah Ideologi Negara Indonesia (Internal)

Rumusan tentang ketaatan dan perlawanan kepada negara dalam perspektif politik Islam memang sederhana dan tidak dijelaskan secara mendetail tentang mekanisme maksud *kekufuran yang nyata*. Wahbah az-Zuhaili menafsirkan *kekufuran* diwujudkan dalam bentuk pengingkaran terhadap sebagian ajaran Islam. Apabila kepala negara telah melakukan hal tersebut, maka wajib diperangi untuk kemaslahatan dan persatuan umat.² Hal senada juga dikemukakan Subhi Salih Sa'id, bahwa keluar dari pemerintahan harus ada alasan keluar dari pemerintahan harus ada alasan syar'i, yaitu alasan bahwa seorang kepala negara telah berhukum dengan hukum selain Islam. Lebih lanjut Subhi Salih Sa'id menegaskan tahapan-tahapan cara keluar dari pemerintahan, yaitu pengingkaran dengan hati, pengingkaran dengan lisan, dan gugurnya hak taat kepada kepala negara.³

Keluar dari pemerintah merupakan sikap radikal dan mempunyai implikasi terhadap sikap politik dan akan terjadinya gejolak politik, terutama dari pihak penguasa negara. Oleh karena itu, Subhi menegaskan beberapa syarat rakyat boleh keluar dari pemerintah. Dan, pelanggaran yang dilakukan kepala negara dapat dibuktikan secara empiris. *Pertama*, kepala negara telah *kufr*. seperti kepala negara menolak penerapan hukum Islam, dan mengikuti hukum selain Islam. *Kedua*, adanya alasan yang kuat keluar dari pemerintah. *Ketiga*, memiliki kekuatan untuk menyelamatkan diri.⁴

Dari pemaparan teori di atas tampak jelas bahwa taat dan keluar dari pemerintah terdapat mekanisme dan syarat yang dirumuskan fuqaha sebagai dasar pijakan politik Islam dalam sebuah pemerintahan. Dengan melihat komponen teori tersebut, posisi Hizbut Tahrir terhadap pemerintahan Indonesia berada dalam posisi melawan negara, dengan argumen bahwa sistem pemerintahan Indonesia tidak berdasar Islam, tetapi berdasar Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan mengikuti sistem demokrasi Pancasila. Semua dasar tersebut bagi Hizbut Tahrir bertentangan dengan ideloginya, karena menurut Hizbut Tahrir Indonesia tidak mengikuti prinsip Islam sebagai *qiyādah fikriyyah*. Argumen berikutnya adalah Hizbut Tahrir menilai bahwa Indonesia termasuk negara kapitalis sekuler yang secara politik dan ekonomi tergantung kepada Barat dan Bank Dunia.⁵

Meskipun tidak secara terang-terangan bersikap oposisi total atau melawan negara Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia secara konseptual pemikiran gerakan keagamaannya dapat dikategorikan melawan negara, karena menolak sistem demokrasi, kendati Hizbut Tahrir Indonesia secara fisik belum pernah melakukan kesalahan seperti perebutan kekuasaan di Indonesia. Keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia memang memiliki sikap yang tidak tegas dan selalu menjaga jarak terhadap pemerintah untuk pengamanan keselamatan organisasi partainya. Hizbut Tahrir Indonesia yang

² Wahbah al-Zuhaili, *Nizām al-Islām* (Beirut: Dar Qutaibah, 1993), h. 213.

³ Subhi Abduh Said, *al-Hākim Wa Uṣūl al-Ḥukm Fi al-Nizām al-Islāmi al-Siyāsi Wa al-Iqtisādi Wa al-Ijtimā Wa al-Fikri*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1985), h. 161.

⁴ Subhi Abduh Said, *al-Hākim Wa Uṣūl al-Ḥukm Fi al-Nizām al-Islāmi al-Siyāsi Wa al-Iqtisādi Wa al-Ijtimā Wa al-Fikri*, h. 168.

⁵ Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa dalam berbagai kesempatan Hizbut Tahrir Indonesia selalu mengangkat isu-isu pendidikan, ekonomi, politik, kesejahteraan rakyat, pengelolaan sumber daya alam, peradaban Islam, mengkritik kebijakan pemerintah yang tergantung kepada negara kapitalis, sekuler negara Barat yang dianggap memicu kehancuran Islam dan khilafah *Islamiyyah* di masa silam.

mempunyai sikap mendua terhadap pemerintah Indonesia tersebut merupakan strategi politik dalam mempersiapkan negara khilafah. Menurut pengakuan M. Ismail Yusanto, juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, bahwa partainya tidak mempunyai agenda tersembunyi atau *taqiyyah*, sebagaimana yang dituduhkan kepada partainya. Menurut M. Ismail Yusanto, partainya terbuka bagi siapa saja dan masyarakat bisa mengakses berita-berita Hizbut Tahrir Indonesia, dan dia mengakui bahwa keberadaan Hizbut Tahrir di Timur Tengah memang dilarang, seperti di Mesir, Irak, Yordania, Suriah, dan Saudi Arabia.⁶

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa sistem khilafah tidak mengenal nasionalisme, karena nasionalisme dapat mengancam keberadaan khilafah. Nasionalisme berorientasi pada persoalan Negara lokal, sedangkan khilafah bersifat internasional dan menguasai berbagai Negara-negara Islam dalam satu wadah khilafah, sehingga antara nasionalisme dan sistem khilafah selalu bertolak belakang.

Hizbut Tahrir memandang bahwa Pancasila merupakan sistem kufr. Pandangan ini berimplikasi kepada ekspresi keberagaman di Indonesia, sehingga Hizbut Tahrir bersikap oposisi terhadap konstitusi Negara Indonesia. Bagi Hizbut Tahrir penolakan terhadap Pancasila, merupakan sikap yang tidak bias ditawarkan, karena Negara Islam tidak mengenal dasar Pancasila, dan menurut wacana yang dikembangkan Hizbut Tahrir, Indonesia merupakan wilayah yang memiliki peluang untuk dirubah menjadi dar al-Islam.

Dalam pandangan Hizbut Tahrir demokrasi adalah merupakan paham atau nilai yang non Islami, karena datangnya bukan dari Islam. Konsep demokrasi adalah produk manusia sehingga tidak memiliki kebenaran yang absolut dan bersifat relative, hal ini berbeda dengan sistem khilafah yang dibangun melalui Al-Qur'an dan Hadis yang memiliki kebenaran final. Penolakan Hizbut Tahrir terhadap demokrasi pada dasarnya terletak pada mekanisme teori-teori demokrasi dalam kerangka sistem pengelolaan Negara, misalnya konstitusi Negara, kepemimpinan, sistem kedaulatan, eksekutif, legislatif, yudikatif dan suara rakyat.

Melawan Ideologi Barat (Eksternal)

Separatisme adalah bagian yang tak terpisahkan dari ide globalisasi ekonomi. Bahkan separatisme yang terjadi di berbagai belahan dunia dimaksudkan sebagai upaya untuk membuat kekacauan nasional, pertentangan antar suku, dan kelumpuhan kawasan, yang semuanya bisa dijadikan alasan kuat untuk menerima globalisasi Amerika sebagai sebuah kekuatan yang dapat ditolak lagi. "*Hal ini tampak jelas ketika Amerika berupaya menyelesaikan masalah-masalah separatisme dan melakukan campur tangan untuk bisa memecah belah sebuah negara.*"⁷

"Musuh utama kaum Muslim saat ini adalah negara-negara kafir imperialis seperti AS, Inggris, Perancis, Rusia, Cina, dan sekutu-sekutu mereka." Kaum Muslim harus menjadikan mereka musuh, bukan sahabat apalagi tempat untuk meminta pertolongan dan bantuan dalam upaya memecahkan berbagai krisis yang melanda negeri-negeri Islam. Kaum Muslim juga harus mewaspadai tawaran-tawaran dan mulut manis mereka. Pasalnya, sejarah dan kenyataan saat ini membuktikan, bahwa merekalah

⁶www.hizbut-tahrir.or.id, diakses 23 Agustus 2012.

⁷Kolom Kritik.Menyoal Separatisme, h. 18-20.

hakikatnya yang berada di balik seluruh krisis yang sengaja diciptakan di negeri-negeri Islam.⁸

“Untuk merefleksikan kasus Indonesia, dengan mengideologikan landasan bernegara, tentu dengan ideologi Islam (yang harus dipahami secara utuh oleh komponen publik).” Insya Allah ancaman disintegrasi serta berbagai masalah multidimensional yang sudah menjadi persoalan yang sangat krusial akan mampu untuk direduksi dengan berdirinya semacam model negara baru, yakni negara yang berbasiskan ideologi Islam. Masalahnya, tinggal bagaimana umat sendiri berupaya melakukan perubahan secara total untuk mewujudkan negara baru tersebut.⁹

Aktivitas perubahan terhadap negara—mengubah sistem kafir menjadi sistem Islam—merupakan aktivitas yang bersifat kolektif (‘amal al-jama’i), bukan aktivitas individu (‘amal al-fardhi), karena aktivitas tersebut memang berada di atas kemampuan individu. Tanpa adanya jamaah semacam ini kewajiban tersebut memang tidak akan terlaksana.¹⁰

Meletakkan Islam dengan Liberalisme jelas sama sekali tidak menjunjung Islam, malah sebaliknya. Islam sama sekali bukan pengekor, sebab ia berasal dari Allah, Sang pencipta langit dan bumi. Islam seharusnya hanya tercermin melalui Allah dan Rasul Muhammad saw. saja, “bukan melalui pemikiran liberal Fatima Mernisi, Arkoun, Charles Kurzman, Abdurrahman Wahid, atau Nurcholis Madjid. Hendaknya setiap Muslim berhati-hati terhadap gagasan Islam Liberal serta praktik-praktik interpretasi dan permainan terminologi”. Hal ini merupakan cara yang paling buruk, berbahaya, dan bisa menggelincirkan seorang Muslim dari agamanya, tanpa dasar atau di luar keinginannya. Alih-alih memajukan umat, justru hal ini akan mengokohkan dan mempertahankan imperialisme Barat atas umat, baik secara pemikiran, ideologi, politik, maupun ekonomi.¹¹

Sambutlah wahai kaum Muslim, seruan dan ajakan Allah Swt. yang akan menghidupkan dan membangkitkan kembali kaum Muslim. Kita tidak memiliki pilihan lain saat ini selain kembali kepada sistem dan konsepsi Islam. Kita tidak mengandalkan para cendekiawan yang diasuh oleh peradaban Barat. Kita pun tidak dapat bersandar pada para penguasa Muslim yang telah menghamba kepada AS dan peradaban kapitalis. Lebih dari itu, “*kita tidak mungkin bangkit melawan berbagai kesewenang-wenangan yang dibuat oleh AS sekaligus membebaskan seluruh umat manusia dari cengkeraman ideologi kapitalis yang menjijikkan, selain dengan membangun kembali negara Khilafah Islamiyah.*”¹²

“Umat Islam harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menenggelamkan peradaban Barat yang bercokol di negeri-negeri Islam, yang sudah menjajah sejak lama serta menjerumuskan kaum Muslim ke dalam kehinaan, penderitaan, dan rasa

⁸Majalah al-Wa‘ie. Judul Cover Menggagas Negara Baru. No. 13 tahun II, tanggal 1-30 September 2001. Kolom Dari Redaksi. AS: Musuh Utama Kaum Muslim, h. 3-4

⁹Majalah al-Wa‘ie. Judul Cover Menggagas Negara Baru. No. 13 tahun II, kolom Fokus. Menggagas negara Baru. Oleh: Denny Kodrat, h. 7-12

¹⁰Majalah al-Wa‘ie. Judul Cover Menggagas Negara Baru. No. 13 tahun II, kolom Analisis. Paradigma Baru Reformasi: Dari Islah ke Tagyir, h. 13-19.

¹¹Majalah al-Wa‘ie. Judul Cover Menggagas Negara Baru. No. 13 tahun II, kolom Wacana. “Islam Liberal” Memasung Islam, h. 37-40.

¹²Majalah al-Wa‘ie. Judul Cover *Menyambut Benturan Peradaban*. No. 15 tahun II, tanggal 1-30 Nopember 2001. Kolom Dari Redaksi. Memutuskan Ketergantungan, Membangun Kemandirian, h. 3-4

malu berkepanjangan.” Konflik adalah konsekuensi logis yang harus terjadi. Akan tetapi, apakah ada satu peradaban besar di dunia ini yang pernah lahir tanpa melalui konflik. Benturan peradaban Islam-Barat adalah suatu kepastian. Oleh karena itu, perlawanan ideologis adalah satu-satunya jalan. Apakah Anda masih mempunyai waktu untuk berdialog dengan perampok yang tengah mengayunkan goloknya ke arah leher anda? Ataukah Anda berpikir baru melawan ketika golok itu sudah betul-betul menggorok leher Anda? Terlambat!¹³

Yang kita butuhkan sekarang ini adalah negara Khilafah yang dicirikan oleh 3 (tiga) kekuatan utama, yaitu: kekuatan ideologi, kekuatan militer, dan kekuatan ekonomi. Ketiga kekuatan ini terjalin berkelindan dan tak bisa dipisahkan. Meski demikian, basis yang paling utama dari tiga kekuatan itu adalah kekuatan ideologi, yang bertumpu pada 2 (dua) unsur kunci, yaitu: (1) pemahaman yang sah terhadap Islam; (2) penerapan Islam yang baik, baik untuk urusan dalam negeri maupun luar negeri. *“Jika negara Khilafah seperti itu telah terwujud di muka bumi, benturan peradaban Islam melawan Barat tidak hanya akan berjalan seimbang, tetapi juga, insya Allah, akan mampu menghancurkan peradaban Barat; sebuah peradaban yang gagal, yang telah menyeret umat manusia di seluruh dunia terperosok ke dalam jurang penderitaan dan kesengsaraan yang sangat dalam.”*¹⁴

Kaum Muslim sudah seharusnya tidak terkecoh oleh rekayasa dan intrik AS, termasuk dalam masalah Afghanistan. Solidaritas Muslim yang terbangun sudah seharusnya bersifat ideologis, yakni berlandaskan *fikrah* dan *thariqah*, bukan solidaritas senasib yang bersifat temporal. Oleh karena itu, *“hanya dengan membangun masyarakat Islam dan negara Islam yang berlandaskan ideologi Islamlah, kaum Muslim akan mampu membendung segala macam gempuran, serangan, dan operasi militer AS, termasuk operasi militer pengabdian Barat tanpa batas demi kapitalisme.”*¹⁵

Adakah saat ini yang mampu menolong dan melindungi negeri-negeri Islam dan kaum Muslim dari arogansi dan agresi Amerika Serikat dan sekutunya? Umat memerlukan seorang Khalifah yang akan menyatukan seluruh negeri-negeri Islam di bawah naungan Khilafah Islamiyah yang akan melawan, mengusir, dan menaklukkan negara-negara imperialis kafir seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Perancis, Kanada, Jerman, dan sekutunya.¹⁶

Dari hasil penelitian ini, 2 implikasi yang ditimbulkan tidak akan tercapai oleh karena tantangan 3 faktor:

a) Sistem demokrasi yang dikembangkan di Indonesia

Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintah politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Demokrasi berasal dari

¹³Majalah al-Wa'ie. Judul Cover *Menyambut Benturan Peradaban*. No. 15 tahun II, kolom Fokus. Benturan Peradaban: Keniscayaan Sejarah, Oleh: Ahmad Sadjid, h. 7-12

¹⁴Majalah al-Wa'ie. Judul Cover *Menyambut Benturan Peradaban*. No. 15 tahun II, kolom Analisis. Benturan Peradaban dan Revitalisasi negara Islam. Oleh: Muhammad Shiddiq Al Jawi, h. 13-19.

¹⁵Majalah al-Wa'ie. Judul Cover *Menyambut Benturan Peradaban*. No. 15 tahun II, kolom Wacana. Motiv lain di Balik Agresi AS. Oleh: Ahmed Shaheed dan Farhan Muhammad, h. 28-31.

¹⁶Majalah al-Wa'ie. Judul Cover *Menyambut Benturan Peradaban*. No. 15 tahun II, kolom Teladan. Menyambut Seruan Jihad Khalifah Abu Bakar r.a, h. 48.

bahasa Yunani (*dēmokratía*) “kekuasaan rakyat”, yang dibentuk dari kata (*dēmos*) “rakyat” dan (*Kratos*) “kekuasaan”.

Jadi dapat di tarik kesimpulan bahwa Sistem pemerintahan Demokrasi adalah sistem pemerintahan suatu negara yang kekuasaannya mutlak di tentukan oleh rakyat / melalui perwakilan rakyat.¹⁷

Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat). Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburgnya mendefinisikan demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.

Dengan adanya sistem demokrasi, kekuasaan absolut satu pihak melalui tirani, kediktatoran dan pemerintahan otoriter lainnya dapat dihindari. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat, namun pada masa awal terbentuknya belum semua orang dapat mengemukakan pendapat mereka melainkan hanya laki-laki saja. Sementara itu, wanita, budak, orang asing dan penduduk yang orang tuanya bukan orang setempat tidak memiliki hak untuk itu. Demokrasi terbentuk menjadi suatu sistem pemerintahan sebagai respon kepada masyarakat umum yang ingin menyuarakan pendapat mereka.

Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Masalah keadilan menjadi penting, dalam arti setiap orang mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi hak tersebut harus dihormati dan diberikan peluang serta pertolongan untuk mencapai hal tersebut.

Sebagaimana di sebutkan diatas bahwa secara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu:

Demokrasi langsung.¹⁸ Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena dimana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Di era modern sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara.

¹⁷Robert Dahl, *Democracy and Its Critics* (New Haven and London: Yale University Press, 1989), h. 10

¹⁸Robert Dahl, *Democracy and Its Critics*, h. 10

Demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.

b) Masyarakat Madani (Civil Society)

Terwujudnya peradaban yang unggul merupakan cita-cita dari masyarakat madani atau cita-cita umat yang mandiri dan independen dari masyarakat politik (political society), ia menjadi alat control terhadap political society (negara). Masyarakat tidak harus berhadapan-hadapan dengan negara, karena hakekat dari pemerintahan demokratis menghendaki pemerintahan untuk memerintah masyarakat madani secara tidak berlebihan, tetapi juga tidak terlalu sedikit. Dengan demikian, pemerintah tetap merupakan factor krusial bagi proses demokratisasi dan reformasi politik yang merupakan agenda bagi berbagai gerakan dan kelompok reformasi dalam masyarakat ke arah pembentukan masyarakat madani.¹⁹

Secara sosiologi orang-orang yang memiliki ketaatan terhadap perintah-perintah agama cenderung untuk mengelompokkan diri ke dalam organisasi keagamaan tertentu. Mungkin juga sebaliknya, pengelompokan ini justru yang membuat mereka taat dalam menjalankan perintah agama. Berikut ini adalah informasi kedekatan kaum muslim Indonesia dengan organisasi keislaman, khususnya NU dan Muhammadiyah.

NU dan Muhammadiyah merupakan ormas terbesar di tanah air memiliki peran penting dalam proses pengembangan nilai-nilai demokrasi dan penguatan civil society di masyarakat. Peran strategis kedua organisasi tersebut tidak hanya pada aspek kuantitasnya saja. Pada aspek kualitasnya pun kedua organisasi tersebut patut diperhitungkan. Temuan yang menarik dari penelitian ini adalah keanggotaan, baik sebagai anggota NU atau Muhammadiyah tidak menyebabkan mereka bersifat negatif terhadap kelompok lainnya. Artinya, seorang NU tidak bersikap negatif terhadap orang Muhammadiyah.²⁰ Begitu pula sebaliknya. Untuk ukuran tertentu batas antara kedua kelompok ini menjadi blurred. Fenomena ini menunjukkan bahwa baik NU maupun Muhammadiyah telah sampai pada pemahaman bahwa Islam tidak bisa dimonopoli oleh kelompok manapun. Setiap orang berhak menafsirkannya selama didasari untuk mencari kemenangan.

Model dasar keberislaman NU dan Muhammadiyah ini dipengaruhi semangat yang inklusif, pada perkembangan selanjutnya mereka dapat menerima dan mendukung demokrasi. Keislaman mereka tidak berputar ke dalam dan memandang diri mereka sebagai pusatnya, tapi bergerak keluar dan bertemu dengan nilai-nilai yang universal. Pandangan keagamaan yang berputar ke dalam dan memandang diri sebagai pusatnya adalah parokialisme. Kelompok keagamaan yang

¹⁹Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tantangan* (Bandung: Rosdakarya, 1999), h. viii.

²⁰Muhammadiyah misalnya melakukan penyesuaian dengan kebijakan pemerintah. Organisasi ini sebagaimana telah disinggung sebelumnya, menyesuaikan tujuan organisasinya agar relevan dengan asas Pancasila. Dalam memperjuangkan jenis masyarakat yang dikehendakinya- mengedepankan prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar* – upaya penyadaran umat agar dapat beragama sesuai dengan ajaran Islam murni- Islam otentik atau dengan kata lain purifikasi. Bagi Muhammadiyah, kalau umat sudah terbiasa dengan kehidupan beragama, maka bangunan masyarakat yang baik juga akan dapat terwujud. Syarifuddin Jurdi, *Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik Studi tentang tingkah laku politik elite lokal Muhammadiyah Sesudah Orde Baru* (UGM Press, 2004).

memiliki pandangan seperti ini tidak bisa mengadopsi nilai-nilai yang universal karena pintu dengan dunia luar tertutup rapat.

Secara umum pertarungan pemaknaan terhadap Islam masih dikuasai oleh kalangan Islam moderat. Hal ini bisa dilihat dalam besarnya dukungan umat Islam terhadap partai-partai politik. Masalahnya adalah rentetan kejadian yang terjadi akhir-akhir ini baik di dalam maupun di luar negeri, menyita perhatian masyarakat dan media untuk memperhatikan kelompok Islam radikal. Dalam hal ini, NU dan Muhammadiyah memainkan peran penting sebagai benteng Islam moderat di Indonesia. NU yang sering disebut sebagai Islam tradisional, dan Muhammadiyah sebagai Islam modernis memiliki kultur keagamaan yang berbeda. Namun di lapangan, mereka ternyata tidak banyak berbeda. Mereka sama-sama positif terhadap kultur demokrasi dan pluralisme, dan negatif terhadap kultur politik Islam. Namun bila ditafsirkan melalui sisten dan kerangka NU dan Muhammadiyah, yang akan muncul adalah wajah Islam yang moderat, inklusif, dan toleran. Kedua organisasi ini menetralisasi fundamentalisme dan radikalisme yang terkandung dalam tubuh Islam.

- c) Peran lembaga MUI yang moderat sehingga dapat menangkal paham radikal dan sekuler.

Majelis Ulama Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriyah bertepatan tanggal 26 Juli 1975 Miladiyah adalah rahmat Allah SWT kepada bangsa Indonesia yang patut disyukuri. Majelis Ulama Indonesia hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan, energi bangsa terserap dalam perjuangan politik baik di dalam negeri maupun di dalam forum internasional, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun menjadi bangsa yang maju, dan berakhlak mulia.

Ulama Indonesia menyadari dirinya sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi (warotsatl anbiyaai) pembawa risalah Ilahiyah dan pelanjut misi yang diemban Rasulullah Muhammad SAW. Mereka terpanggil bersama-sama zu'amma dan cendekiawan muslim untuk memberikan kesaksian akan peran kesejarahan pada perjuangan kemerdekaan yang telah mereka berikan pada masa penjajahan, serta berperan aktif dalam membangun masyarakat dan mensukseskan pembangunan melalui berbagai potensi yang mereka miliki dalam wadah Majelis Ulama Indonesia. Ikhtiyar-ikhtiyar kebajikan yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia senantiasa ditujukan bagi kemajuan agama, bangsa dan negara baik pada masa lalu, kini dan mendatang.

Para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim menyadari bahwa negara Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim adalah suatu konsekuensi logis dan prasyarat bagi berkembangannya hubungan yang harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Karena umat Islam adalah bagian terbesar dari bangsa Indonesia, maka wajar jika umat Islam memiliki peran dan tanggungjawab terbesar pula bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia di masa depan. Namun adalah suatu hal yang tidak boleh dinafikan bahwa umat Islam masih menghadapi masalah internal dalam berbagai aspek, baik sosial, pendidikan, kesehatan, kependudukan, ekonomi, dan politik.

Disisi lain, saat ini umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Tantangan tersebut antara lain berupa ideologi liberalisme kapitalisme yang berpangkal pada sekularisme enggan sitem politik dan sistem ekonomi yang sering dipaksakan berlaku di negeri-negeri lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat dan bercirikan pendewaan diri, kebendaan, dan nafsu syahawatiah yang potensial melunturkan aspek religiusitas masyarakat, serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Lebih daripada itu, kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik selain dapat merupakan kekuatan, tetapi juga sering menjelma menjadi kelemahan dan sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Sebagai akibatnya, umat Islam terjebak ke dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan dan kehilangan peluang untuk mengembangkan diri menjadi kelompok yang tidak hanya besar dalam jumlah, tetapi juga unggul dalam kualitas. Oleh karena itu, adanya kepemimpinan umat Islam yang kolektif merupakan kewajiban (*wajib al-imamah*), seperti adanya suatu organisasi yang menjadi wadah silaturahmi, merupakan suatu kebutuhan mendesak bagi persatuan, kasatuan, dan kebersamaan umat Islam. Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan kebangsaan para era reformasi dewasa ini, yang ditandai dengan adanya keinginan kuat untuk membangun suatu masyarakat Indonesia baru yang adil, sejahtera, demokratis, dan beradab, maka adalah suatu keharusan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk meneguhkan jati diri dan iktikad dengan suatu wawasan untuk menghela proses perwujudan peradaban Islam di dunia, dan khususnya perwujudan masyarakat Indonesia baru, yang tidak lain adalah masyarakat madani (*khair al ummah*) yang menekankan nilai-nilai persamaan (*al-musawah*), keadilan (*al-adalah*), dan demokratis (*al-syura*).

PENUTUP

Kesimpulan

1. HTI adalah organisasi massa sebagaimana organisasi massa lainnya yang ada di Indonesia, adalah kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin kemerdekaan setiap orang untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Meski ideologi yang di anut oleh Hizbut Tahrir berbeda dengan ideologi Negara Indonesia, hal ini bukan berarti Negara harus bertindak represif. Peneliti menyarankan pemerintah berfokus pada usaha-usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang mana hal ini dengan sendirinya merupakan *soft power* untuk menekan munculnya suara-suara sumir tentang ketidakadilan, kegagalan sistem politik di Indonesia dan lain sebagainya.
2. Penulis menyayangkan sekelompok organisasi islam yang secara vulgar menyerang kelompok ini dan bukannya membangun dialog. Padahal bila ditelaah, di tengah berbagai perbedaan antar kelompok pergerakan Islam akan ditemukan banyaknya persamaan di antara mereka, yang mana persamaan tersebut sudah lebih dari cukup untuk membangun dialog. Terlebih, Hizbut Tahir sangat terbuka terhadap kritik, selama kritik tersebut dilakukan dengan cara yang baik dan bertujuan untuk membangun.
3. Berkaitan dengan konsep khilafah yang di usung oleh HT, tidak ada salahnya untuk dikaji, toh HT sendiri mengakui bahwa khilafah hanyalah metode bukan tujuan. Bila metode ini secara filosofis, normatif, historis, dan akademis layak dan mampu membawa individu dan masyarakat luas dan dunia menjadi lebih baik maka sangat mengherankan bila kita harus menutup diri dengan konsep tersebut.
4. Adapun konsep jihad offensif HT, peneliti merasa perlu dilakukan kajian kembali dengan lebih seksama, komprehensif dan mendalam untuk kemudian dijabarkan dengan jelas dan di kritisi. Hal ini perlu dilakukan agar konsep jihad offensif ini tidak disalah artikan oleh siapapun, baik oleh para pendukung maupun yang kontra terhadap konsep ini, sehingga berpotensi menimbulkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ini maupun terhadap kelompok ini.

Saran

Peneliti merasa perlu untuk mengingatkan kembali, bahwa suatu gerakan sosial, termasuk HT, muncul tidak dari ruang hampa, tetapi merupakan reaksi terhadap keadaan sosial lainnya yang dianggap memicu munculnya gerakan tersebut. Maka adalah suatu kesalahan bila perbaikan dilakukan dari hilir bukan di hulu. Maksudnya, untuk menekan munculnya gerakan/ organisasi yang bersifat radikal, hendaknya bukan dengan menekan dan menutup organisasi tersebut, karena selama masalah yang menyebabkan munculnya gerakan tersebut tetap eksis maka gerakan radikal akan selalu muncul dengan berbagai macam wajah, baik secara terang-terangan maupun di bawah tanah, baik dengan mengusung agama maupun tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tantangan*, Bandung: Rosdakarya, 1999.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Nizām al-Islām*. Beirut: Dar Qutaibah, 1993.
- Dahl, Robert. *Democracy and Its Critics*, New Haven and London: Yale University Press, 1989.
- Jurdi, Syarifuddin. *Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik Studi tentang tingkah laku politik elite lokal Muhammadiyah Sesudah Orde Baru* (UGM Press, 2004)
- Kolom Kritik. Menyoal Separatisme.
- Majalah al-Wa'ie. Judul Cover Menggagas Negara Baru. No. 13 tahun II, tanggal 1-30 September 2001. Kolom Dari Redaksi. AS: Musuh Utama Kaum Muslim.
- Majalah al-Wa'ie. Judul Cover *Menyambut Benturan Peradaban*. No. 15 tahun II, tanggal 1-30 Nopember 2001. Kolom Dari Redaksi. Memutuskan Ketergantungan, Membangun Kemandirian.
- Robert Dahl, *Democracy and Its Critics*. New Haven and London: Yale University Press, 1989.
- Subhi Abduh Said, *Al-Ḥākim Wa Uṣūl al-Ḥukm Fi al-Nizām al-Islāmi al-Siyāsi Wa al-Iqtisādi Wa al-Ijtimā Wa al-Fikri*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1985.
- www.hizbut-tahrir.or.id
- Zainuddin. "Pengambilalihan Kekuasaan dalam Perspektif Pemikiran Politik Hizbut Tahrir". Disertasi tidak dipublikasikan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.